

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi akal budi dan nurani.<sup>1</sup> Akal budi dan nurani tersebut membuat manusia mampu untuk membedakan baik dan buruk yang mana akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya.<sup>2</sup> Hal tersebut membuat manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya.<sup>3</sup> Manusia juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan untuk mengimbangi kebebasan berbuat yang dimiliki oleh manusia.<sup>4</sup> Kebebasan itulah yang disebut dengan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia.<sup>6</sup> Hak asasi manusia dimiliki bukan karena diberikan oleh masyarakat berdasarkan hukum positif, tetapi berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup> Setiap manusia tetap memiliki hak-hak tersebut, walaupun ia terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*

budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda.<sup>8</sup> Hak asasi manusia dikatakan bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*).<sup>9</sup> Seburuk apapun perlakuan yang dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, hak asasi manusia akan tetap melekat pada dirinya karena ia tidak akan berhenti menjadi manusia.<sup>10</sup>

Hak asasi manusia akan selalu melekat dalam diri manusia karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Maka dari itu, hak-hak tersebut tidak dapat diingkari.<sup>12</sup> Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.<sup>13</sup> Salah satu faktor yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terutama anak-anak adalah konflik bersenjata.<sup>14</sup> Anak-anak tidak memulai sebuah konflik bersenjata, namun menjadi pihak yang paling rentan terhadap efek mematakannya.<sup>15</sup> Hal ini disebabkan karena dalam situasi konflik bersenjata, anak-anak sering terbunuh, dipaksa untuk terlibat dalam konflik bersenjata, kehilangan orang tua, bahkan harus kehilangan tempat tinggal.<sup>16</sup>

Pada masa sekarang salah satu negara yang tengah menghadapi situasi konflik bersenjata adalah Yaman yang terjadi akibat dampak dari

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Penjelasan Umum, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Al Khanif, dkk, 2017, *Hak Asasi Manusia : Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Penerbit LKIS, Yogyakarta, hlm. 312.

<sup>15</sup> UNICEF, *Yemen Fragile to Failed*, hlm. 3, [https://www.unicef.org/spanish/media/files/Yemen--Fragile to Failed.pdf](https://www.unicef.org/spanish/media/files/Yemen--Fragile%20to%20Failed.pdf), diakses 17 September 2018

<sup>16</sup> *Ibid.*

gelombang *Arab Spring*.<sup>17</sup> Fenomena *Arab Spring* berawal dari ketidakpuasan rakyat Tunisia kepada Presiden Tunisia pada tahun 2010 yang kemudian merambah ke negara-negara Arab lainnya yang salah satunya adalah Yaman.<sup>18</sup> Ketidakpuasan rakyat Yaman dengan pemerintah dipicu oleh terjadinya korupsi, penindasan serta pelanggaran hak asasi manusia.<sup>19</sup> Ketidakpuasan yang terjadi juga diakibatkan jabatan Presiden Yaman yang dipegang oleh Ali Abdullah Saleh yang dirasa terlalu lama yaitu selama 33 tahun, sehingga protes banyak terjadi untuk menyerukan pemaksaan pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh.<sup>20</sup> Presiden Ali Abdullah Saleh akhirnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Yaman dan menandatangani kesepakatan transfer kekuasaan kepada Wakil Presiden Abdrabuh Mansour Hadi sampai pemilihan umum diadakan.<sup>21</sup> Februari 2012 dilaksanakan pemilihan presiden dan terpilihlah Abdrabuh Mansour Hadi sebagai Presiden Yaman.<sup>22</sup>

Ketidakstabilan politik di Yaman dikarenakan upaya penggulingan Ali Abdullah Saleh dijadikan celah oleh Kelompok Houthi yang beraliran

---

<sup>17</sup> Rahman Asmardika, Kronologi Konflik Yaman hingga Kini, <https://news.okezone.com/read/2015/03/28/18/1125649/kronologi-konflik-yaman-hingga-kini>, diakses 28 Februari 2019.

<sup>18</sup> BHP UMY, Fenomena Pasca *Arab Spring* Beri Tantangan baru, <http://www.umi.ac.id/fenomena-pasca-arab-spring-beri-tantangan-baru.html>, diakses 28 Februari 2019.

<sup>19</sup> Amnesty International, *Yemen: The War Forgotten By The World*, <https://www.amnesty.org.au/yemen-forgotten-war/>, diakses 28 Februari 2019.

<sup>20</sup> Human Rights Watch, *World Report 2012: Yemen*, <https://www.hrw.org/world-report/2012/country-chapters/yemen>, diakses 28 Februari 2019.

<sup>21</sup> Security Council Report, *Chronology of Events*, <https://www.securitycouncilreport.org/chronology/yemen.php>, diakses 28 Februari 2019.

<sup>22</sup> Security Council Report. *Loc. Cit.*

Syiah untuk merebut kekuasaan dari pemerintah.<sup>23</sup> Pertempuran terjadi antara pasukan Pemerintah Yaman dengan Kelompok Houthi di tepi Ibukota Sanaa pada September 2014.<sup>24</sup> Pada Maret 2015, koalisi yang dipimpin Arab Saudi menyerang pasukan Houthi untuk mendukung Presiden Yaman Abdrabuh Mansour Hadi.<sup>25</sup> Tidak hanya pemerintah Yaman yang mendapat dukungan dari negara lain, tetapi Kelompok Houthi juga didukung dengan pasokan senjata, uang serta pelatihan dari Iran.<sup>26</sup> Serangan yang berlangsung dari darat dan udara menimbulkan korban, menyebabkan kerusakan yang luas terhadap infrastruktur publik dan swasta.<sup>27</sup> Konflik yang berlangsung di Yaman memiliki dampak yang menghancurkan terutama pada anak-anak.<sup>28</sup>

Konflik di Yaman menyebabkan sekitar 14,1 juta orang termasuk 7,4 juta anak-anak membutuhkan perawatan kesehatan.<sup>29</sup> *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) memperkirakan bahwa hampir 10.000 anak di bawah usia lima tahun mungkin telah meninggal pada tahun 2015 dari penyakit yang dapat dicegah sebagai akibat dari penurunan layanan kesehatan utama.<sup>30</sup> Selain itu, lebih dari 1,3 juta anak-anak berisiko

---

<sup>23</sup> Rahman Asmardika, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Human Rights Watch, Yemen Event of 2018*, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen>, diakses 14 April 2019.

<sup>26</sup> Yara Bayoumy dan Mohammed Ghobari, *Iranian support seen crucial for Yemen's Houthis*, <https://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-iran-insight/iranian-support-seen-crucial-for-yemens-houthis-idUSKBN0JT17A20141215>, diakses 14 April 2019.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *OHCHR, Situation of Human Rights in Yemen*, hlm. 5, [https://www.ohchr.org/documents/countries/ye/ohchryemen\\_report2016\\_en.docx](https://www.ohchr.org/documents/countries/ye/ohchryemen_report2016_en.docx), diakses 17 September 2018.

<sup>29</sup> *UNICEF, Op. Cit.* Hlm. 8.

<sup>30</sup> *Ibid.*

terserang saluran pernafasan akut dan 2,6 juta diantaranya di bawah usia 15 tahun berisiko terkena campak.<sup>31</sup>

Konflik bersenjata yang terjadi di Yaman berawal dari konflik bersenjata non-internasional yang kemudian menjadi konflik bersenjata internasional karena adanya intervensi dari koalisi Arab Saudi dan Iran. Pengaturan tentang perlindungan orang-orang sipil dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Konflik Bersenjata kemudian dikembangkan dalam sebuah Protokol yang melengkapi pengaturan tentang perlindungan orang-orang sipil dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Protokol I maupun Protokol II dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Pengaturan terkait hak anak dalam konflik bersenjata juga diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata.

Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu permusuhan mendapatkan perlindungan tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata.<sup>32</sup> Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas, maka penulis mengangkat tema “Implementasi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Enny Narwati, dkk, 2008, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata”, J. Penelit. Din. Sos. Vol. 7, No. 1, April 2008, hlm. 6.

Hukum tentang Hak Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan di angkat oleh penulis adalah bagaimana implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tentang hubungan internasional yang berkaitan dengan implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan atau data informasi di bidang hukum khususnya hubungan internasional:

- a. Bagi Pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk lebih memperhatikan kepentingan negara dan bangsa, sehingga mampu menghindari adanya konflik-konflik yang mampu memicu ketidakstabilan pemerintahan dan senantiasa mampu menciptakan perdamaian.
- b. Bagi Pembentuk Undang-Undang untuk memperhatikan permasalahan terkait hak asasi manusia dan meratifikasi perjanjian internasional yang terkait dengan pengaturan hak asasi manusia serta menuangkannya dalam instrumen hukum nasional, sehingga ada kepastian hukum.
- c. Bagi Akademisi, sebagai data maupun bahan ajar yang berkaitan dengan implementasi hukum tentang hak asasi manusia terhadap anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.
- d. Bagi Warga Sipil untuk memberikan informasi tentang implementasi hukum tentang hak asasi manusia terhadap anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional, sehingga mengetahui hak-hak apa saja yang diperoleh anak ketika negara dalam situasi konflik bersenjata non-internasional.
- e. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir agar dapat menyandang gelar sarjana hukum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul implementasi hukum anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional adalah penelitian asli penulis dan bukan merupakan plagiasi.

1. Saiful Rizal, 01361012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008, menulis judul skripsi Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata (Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam) dengan rumusan masalah adalah bagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata dan dimanakah letak persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam melindungi masyarakat sipil pada saat terjadi konflik bersenjata.

Hasil penelitian Saiful Rizal adalah hukum humaniter sebagai bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan Hukum Perang yang mengatur perang itu sendiri. Hukum Humaniter dalam pengertian yang lebih luas memiliki arti, ketetapan yang sah tentang undang-undang yang konstitusional dan tertulis, untuk menjamin penghormatan terhadap individu dan mengatur tentang kesejahteraannya. Kemudian, dalam Islam perang diartikan sebagai peperangan yang dilakukan oleh Ummat Islam terhadap pihak manapun untuk mempertahankan agama



dan Ummat Islam dari serangan-serangan musuh. Ketentuan perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi perang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949, sedangkan dalam Islam sebagai agama senantiasa memerintahkan ummatnya untuk tidak berlebihan dalam menggunakan kekerasan dalam peperangan. Pada dasarnya antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam tidak memiliki perbedaan yang fundamental, tetapi dalam masalah teknis dan implementasi prosedural terdapat perbedaan, dikarenakan permasalahan perang di era modern lebih kompleks apabila dibandingkan dengan zaman dahulu, termasuk dalam hal memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil.

2. Agus Prakoso, E 0003056, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, menulis judul skripsi perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon (studi normatif tentang implementasi Konvensi Jenewa IV 1949) dengan rumusan masalah adalah apakah ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai perlindungan hukum terhadap anak sudah diimplementasikan pada saat konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon serta apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 pada perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon.

Hasil penelitian Agus Prakoso adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil khususnya adalah perlindungan hukum anak pada saat terjadi konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang bertikai belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para pihak. Namun kenyataannya, berbagai pasal yang secara jelas mengatur perlindungan anak masih banyak dilanggar (Pasal 1, 2, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 38 dan 50 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Konvensi Jenewa IV tahun 1949 hanya mengatur tentang aturan-aturan dasar tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang jadi tidak bisa bersifat operasional atau diterapkan secara langsung, ketika terjadi sebuah pelanggaran yang berperan sebagai penegakan hukum adalah hukum nasional dari masing-masing pihak. Para pihak bukanlah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Ketika masing-masing pihak menganggap bahwa tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan, maka Konvensi Jenewa akan sulit untuk mengaturnya.

Hambatan atau Kendala yang Timbul dalam implementasi Konvensi Jenewa IV tahun 1949 adalah:

- a. Prinsip pembedaan atau *distinction principle* yang tidak secara maksimal dilakukan oleh para pihak peserta yang sedang terjadi konflik. Hal ini dapat dilihat dengan besarnya jumlah

korban penduduk sipil daripada jumlah para kombatan dari masing-masing pihak yang bersengketa.

- b. Prinsip pembatasan atau *limitation principle* dan prinsip keseimbangan atau *proportionality principle* kurang diperhatikan oleh para pihak. Penggunaan kekuatan militer oleh Israel secara besar-besaran mengakibatkan ketimpangan dalam hal kekuatan tempur dari para pihak sehingga menimbulkan perang yang berat sebelah dan akibatnya adalah penggunaan senjata yang berlebihan dan mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.
- c. Asas kepentingan militer, asas kesatriaian dan asas kemanusiaan tidak dilaksanakan secara seimbang oleh pihak yang bertikai. Ketiga asas tersebut secara jelas tidak dipatuhi oleh para pihak, hal ini ditunjukkan dengan pelanggaran asas kepentingan militer yang dilakukan oleh pihak Israel dengan pengerahan seluruh pasukan tempurnya dalam membombardir kawasan Libanon, kemudian pelanggaran asas kesatriaian ditunjukkan oleh pihak Hizbullah yang menyamarkan diri dalam masyarakat sehingga korban anak-anak (*civillian*) tidak dapat dihindari, yang terakhir adalah pelanggaran asas kemanusiaan oleh pihak Israel yang ditunjukkan dengan penggunaan *Cluster Bomb* dalam

melumpuhkan lawannya yang juga melukai anak-anak (*civillian*).

3. Yoga Praditya, 010507662, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, menulis judul skripsi perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata Darfur di Sudan. Dengan rumusan masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata Darfur, Sudan.

Hasil penelitian Yoga Praditya adalah ketika terjadi konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, perlu ditaati peraturan-peraturan Hukum Humaniter Internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya korban-korban perang. Dalam konflik bersenjata non-internasional Darfur di Sudan banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia. Dalam konflik ini penduduk sipil tidak mendapatkan perlindungan bahkan dijadikan sasaran serangan. Dengan kata lain bahwa Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 telah diabaikan. Akan tetapi, beberapa upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB terkait pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam konflik ini.

Berdasarkan pemaparan keaslian penelitian ada letak perbedaan antara penelitian Saiful Rizal dengan penelitian penulis. Saiful Rizal melakukan penelitian mengenai perlindungan penduduk

sipil dalam kondisi perang terkait dengan perbandingan pengaturan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam. Penulis melakukan penelitian terhadap implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman yang mana hanya menggunakan Hukum Humaniter Internasional sebagai dasar pemberian jaminan hak.

Berdasarkan pemaparan keaslian penelitian ada letak perbedaan antara penelitian Agus Prakoso dengan penelitian penulis. Agus Prakoso melakukan penelitian mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam konflik bersenjata internasional karena pihaknya adalah Israel dan Libanon. Penulis melakukan penelitian mengenai implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata non-internasional yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata internasional karena adanya intervensi negara lain.

Berdasarkan pemaparan keaslian penelitian ada letak perbedaan antara penelitian Yoga Praditya dengan penelitian penulis. Yoga Praditya melakukan penelitian mengenai konflik bersenjata non-internasional. Penulis melakukan penelitian mengenai konflik bersenjata non-internasional yang kemudian menjadi konflik bersenjata internasional karena adanya intervensi dari negara lain.

#### **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum/skripsi ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau

pengertian-pengertian istilah yang berubungan dengan objek yang diteliti.

Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Hukum

Hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,<sup>33</sup> yang dalam hal ini adalah Hukum Humaniter Internasional.

2. Anak

Anak adalah setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali di bawah peraturan yang berlaku untuk anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>34</sup>

3. Konflik Bersenjata Non-International

Konflik bersenjata non-internasional adalah pertempuran antar pemerintah angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata.<sup>35</sup>

4. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses 31 Oktober 2018.

<sup>34</sup> *OHCHR, Loc. Cit.*

<sup>35</sup> *ICRC, Loc. Cit.*

<sup>36</sup> Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, hlm. 5, [http://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835\\_05.\\_Hukum\\_Humaniter\\_dan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusi\\_a.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05._Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusi_a.pdf), diakses 31 Oktober 2018.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif,<sup>37</sup> khususnya Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Konflik Bersenjata, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002 yang berkaitan dengan pengaturan hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman.

### **2. Data**

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

#### **a. Bahan hukum primer, berupa:**

- 1) Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Konflik Bersenjata.
- 2) Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949.
- 3) Konvensi Hak Anak Tahun 1989.
- 4) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Terkait Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2002.

---

<sup>37</sup> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Yogyakarta, hlm. 7.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum yang mampu memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap objek yang diteliti.

### 3. Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mencari, membaca, serta menelaah peraturan dan ketentuan dalam Hukum Internasional ataupun pendapat hukum dalam buku, jurnal, hasil penelitian, internet serta dokumen yang diperoleh di Kantor *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Jakarta dan Kantor *United Nation Information Center* (UNIC) Jakarta.
- b. Wawancara, merupakan proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu *Reference Assistant* Kantor *International Committee of the Red Cross* Jakarta dan *Communication Officer* Kantor *United Nation Information Center* Jakarta yang berkompeten terhadap permasalahan yang diteliti. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka serta peneliti



menggunakan alat rekaman *tape recorder* yang dilakukan terhadap narasumber.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
  - 1) Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.
  - 2) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah *Open System* bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.
  - 3) Pemaparan tentang konflik bersenjata di Yaman: kronologi dan aktor-aktor yang terkait.
  - 4) Interpretasi Hukum Positif menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara

horizontal. Interpretasi Hukum Positif juga menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu. Analisis ketimpangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

- 5) Menilai Hukum Positif yang mana yang akan dinilai adalah implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

#### 5. Prosedur Berpikir

Proses berpikir digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. Proposisi yang khusus berupa implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum/skripsi dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. Bab II: Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pengaturan tentang hak anak, konflik bersenjata di Yaman, serta implementasi hukum tentang hak anak dalam konflik bersenjata di Yaman ditinjau dari hukum humaniter internasional.

3. Bab III: Penutup

Bab ini meliputi simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran.